



Buletin

Parlamentaria

Nomor 1046/IV/III/2019 • Maret 2019



Ketua DPR Ajak Anggota Dewan Taat Laport SPT Pajak dan LHKPN



Petani Bawang Merah Minta Pemerintah Jaga Kestabilan Harga

Ketua DPR Ajak Anggota Dewan Taat Lapor SPT Pajak dan LHKPN



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam acara 'DPR Taat Lapor Pajak' kerjasama DPR RI dengan Dirjen Pajak RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) seperti tak kenal lelah, membuat inovasi dan gebrakan baru. Secara khusus, DPR RI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, membuka Coaching Clinic Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pribadi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

A cara bertajuk 'DPR Taat Lapor Pajak', yang diselenggarakan di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3) ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Melalui pidato pembukaannya, Bamsuet, sapaan akrab Ketua DPR RI, mengajak seluruh Anggota DPR RI dan warga negara yang sudah menjadi Wajib Pajak, untuk memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan SPT dan LHKPN kepada negara.

"Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam APBN 2019

yang disahkan pada Oktober 2018, DPR RI dan Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, meningkat dari outlook 2018 sebesar Rp 1.548 triliun. Untuk menyuksekkannya, perlu kerja sama dan dukungan dari setiap wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. Sehingga, bisa turut membangun Indonesia menjadi lebih baik," jelas Bamsuet.

Dalam acara ini, Bamsuet bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan sejumlah Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melaporkan SPT pribadi melalui *clinic e-Filing* milik Direktorat Jenderal Pajak dan LHKPN

melalui *clinic e-LHKPN* yang ada di DPR RI. Bamsuet berharap, dengan adanya *counter* tersebut, para Anggota DPR RI tidak lagi merasa kesulitan untuk membuat laporan pajak dan LHKPN-nya.

"Kami berharap, para Anggota DPR yang selama ini merasa kesulitan untuk membuat laporan pajak dan LHKPN-nya, bisa langsung melaporkan ke *counter* yang

"Kami berharap, para Anggota DPR yang selama ini merasa kesulitan untuk membuat laporan pajak dan LHKPN-nya, bisa langsung melaporkan ke counter yang tersedia di Gedung DPR ini. Karena, di sini ada petugas yang siap mengajarkan dan mendampingi dengan sistem yang lebih mudah, melalui sistem berbasis digital yaitu e-Filing dan e-LHKPN,"

tersedia di Gedung DPR ini. Karena, di sini ada petugas yang siap mengajarkan dan mendampingi dengan sistem yang lebih mudah, melalui sistem berbasis digital yaitu e-Filing dan e-LHKPN,” tutur Bamsuet.

Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi Direktorat Jenderal Pajak yang dengan berbagai sosialisasi dan kampanye, berhasil merealisasikan pelaporan SPT Wajib Pajak mencapai 12,5 juta SPT pada tahun 2018. Dengan besaran 9,87 juta, diantaranya dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, 1,82 juta orang pribadi non karyawan dan 854,3 ribu wajib pajak badan. Pada tahun 2019, ditargetkan kepatuhan masyarakat melaporkan SPT mencapai 85 persen.

“Adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT juga didukung program *tax amnesty* yang dijalankan Pemerintah. Saya mengharapkan jumlah tersebut akan bertambah hingga menjelang penutupan masa pelaporan pada 31 Maret 2019 mendatang,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VII itu.

Melalui *coaching clinic* yang dilakukan hari ini, Bamsuet berharap seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bisa menjadi motor penggerak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Dengan jumlah keseluruhan ASN di Indonesia mencapai 4.351.490, ASN harus menjadi teladan bagi wajib pajak lainnya. Hal itu bisa dimulai dari ASN di lingkungan DPR RI.

Selain melaporkan SPT tahunan pribadi, Bamsuet juga menyelesaikan LHKPN. Sejak Februari 2018, DPR RI bekerjasama dengan KPK mengadirkan E-LHKPN (klinik LHKPN) di selasar Gedung Nusantara III DPR RI. “Selain memudahkan para Anggota DPR RI membuat laporan LHKPN, klinik tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen DPR RI dalam memerangi dan memberantas korupsi sampai ke akarnya,” pungkas Bamsuet.

Hadir dalam acara ini antara lain Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Peni Hirjanto, Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Estu Budiarto, Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Arfan, Direktur P2Humas Hestu Yooga Saksama, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Angin Prayitno, Direktur Teknologi Informasi Perpajakan R. Dasto Leyanto dan Direktorat LHKPN Bidang Pencegahan KPK RI Kunto Ariawan, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, serta pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. ■ **pun/sf**



Foto: Gerald Jik

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Kegiatan Pelestarian Keris, Bentuk Apresiasi Budaya

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap dengan digelarnya pameran 'Kejayaan Keris Madura' dapat meningkatkan apresiasi tertinggi terhadap eksistensi keris-keris Madura.

Sesuai mendampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membuka pameran yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta tersebut, Fadli menegaskan bahwa pameran keris seperti ini telah dilaksanakan sebanyak tiga kali di Kompleks DPR RI.

“Kita menyelenggarakan pameran keris dengan kerja sama antara Setjen DPR RI dengan Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNPI), ini kali ketiga. Kita tahu DPR adalah bagian dari ruang publik, kita berharap dengan adanya pameran keris Madura yang kali ini, ada apresiasi yang lebih baik lagi terhadap keris-keris Madura, baik keris Madura yang sepuh maupun keris Madura yang dibuat baru,” ujar Fadli di sela-sela acara, Selasa (19/3).

Selain itu, politisi Partai Gerindra tersebut juga menjelaskan bahwa keris Madura ini sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2015. Ia berharap bisa terus menyelenggarakan kegiatan pelestarian keris ini, tidak hanya di DPR RI saja, melainkan pula di tempat lain. Karena

hal ini merupakan sarana edukasi dan apresiasi terhadap perkerisan Indonesia.

“Kita pahami bahwa Madura bisa dibidang pusat perkerisan sekarang ini, karena banyak sekali empu-empu keris yang ada di Madura sejak zaman dulu sampai sekarang. Kalau sekarang ini mungkin yang terbanyak para pengrajin maupun empu-empu keris itu berada di Madura. Ini juga bagian dari sebuah ekonomi kreatif dan juga pelestarian terhadap budaya keris,” ujar Fadli.

Menurut politisi dapil Jawa Barat V ini, semakin banyak kolektor keris di Madura bisa menjadikan Madura sebagai pusat keris dunia. Ia menambahkan apresiasi terhadap keris seperti ini akan mengukuhkan satu identitas budaya Indonesia, bahkan budaya itu bisa menjadi satu modal yang penting untuk sekarang maupun kedepannya, untuk menjadi satu modal yang mengkokohkan persatuan juga.

“Di Madura banyak orang-orang yang hidup dari keris turun temurun dari zaman dahulu, dari era sebelum majapahit sampai sekarang empu-empunya. Jadi tradisi itu tidak putus di Madura dan khususnya di Kraton Sumenep dan sekitarnya. Bisa dibidang Madura ini adalah pusat atau ibu kota keris dunia,” pungkas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu. ■ **er,tp/sf**

Komisi I DPR Apresiasi Kesiapan Kodam Brawijaya Kawal Pemilu 2019



Foto: Tiara Ijk
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengapresiasi kesiapan Komando Daerah Militer (Kodam) V/ Brawijaya dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang akan berlangsung 17 April 2019 mendatang.

Kodam V/ Brawijaya dinilai cukup tanggap dan antisipasi dalam memberikan klasifikasi daerah-daerah aman dan rawan terhadap konflik.

“Mereka sudah antisipasi dan menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam menghadapi Pemilu 2019. Selain itu Kodam V/ Brawijaya juga sudah mempersiapkan dan memperhitungkan tindakan-tindakan yang diperlukan, namun tidak di luar batas daripada tupoksi mereka. Hal ini kita hargai sekali,” jelas Satya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Panglima Kodam V/ Brawijaya beserta jajaran, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/3).

Politisi Partai Golkar itu menilai, Kodam V/ Brawijaya sudah memiliki pijakan

dasar dalam mengantisipasi apabila terjadi kerusuhan nantinya pada penyelenggaraan Pemilu 2019. “Tentunya mekanisme kerja antara TNI dan Polri sudah ditetapkan apakah perlu atau tidak perlu dilibatkan. Masing-masing stakeholder tetap mempunyai satu tupoksi yakni mengamankan,” ungkap Satya.

Lebih lanjut dirinya mengimbau, agar TNI tetap menjaga sikap netralitas dalam bekerja. Karena dengan adanya unsur netralitas, TNI dapat mendengar semua suara dan seluruh unsur kekuatan sosial politik yang sedang bertanding dalam Pemilu tanpa perlu memihak. “Kita harapkan mereka bisa lebih mempersiapkan diri untuk mengantisipasi apabila di kemudian hari ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutur Satya.

Agar TNI tetap menjaga sikap netralitas dalam bekerja. Karena dengan adanya unsur netralitas, TNI dapat mendengar semua suara dan seluruh unsur kekuatan sosial politik yang sedang bertanding dalam Pemilu tanpa perlu memihak.

Oleh karena itu dirinya berharap, TNI dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa terutama setelah gelaran pesta demokrasi berlangsung. “Tentunya kita berharap bagaimana nantinya TNI tetap bisa mengamankan siapapun yang terpilih nantinya dalam Pemilu 2019,” imbuh politisi dapil Jatim IX itu.

Pada kesempatan yang sama, dalam sambutannya Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI R. Wisnoe Prasertja Boedi menyampaikan, Kodam V/Brawijaya selaku Komando Utama (Kotama) Ops TNI dengan seluruh jajaran membantu Polda Jatim dalam Ops Pra Pengamanan (PAM) Pemilu tahun 2019.

“Mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelantikan di seluruh wilayah Jatim guna mewujudkan Pemilu yang aman, tertib, dan lancar dalam rangka mendukung tupoksi TNI. Dengan rekapitulasi Pasukan PAM,” jelas Wisnoe.

Dirinya mengatakan, dalam PAM Pemilu 2019, Kodam V/Brawijaya juga telah melaksanakan sejumlah pelatihan, diantaranya latihan Penanggulangan Huru Hara (PHH) dalam. “Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Januari salpai dengan 8 Februari 2019 dan melibatkan 5.100 orang personil TNI AD dan 500 orang personil Polri,” terangnya. ■ **tra/sf**



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron bersama Wakil Gubernur Bali

Komisi II Temukan Permasalahan Persiapan Pemilu di Bali

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron berharap, berbagai permasalahan yang masih ada dalam persiapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) di Provinsi Bali dapat segera diselesaikan.

Dari pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali, terungkap sejumlah permasalahan dalam proses persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar secara serentak pada 17 April 2019 mendatang.

“Permasalahan itu diantaranya terkait jumlah DPT (Daftar pemilih tetap). Sebenarnya ini juga terjadi di daerah-daerah lain,” ujar Herman, usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur Bali, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Daerah, Polda Bali, serta Danrem Bali, di Denpasar, Bali,

Jumat (15/3).

Jumlah DPT ini, lanjut Herman, terkait proses perekaman KTP-Elektronik yang diakui Wagub Bali dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Bali masih terus berlangsung. Bahkan bukan tidak mungkin, di hari H pemilihan juga ada warga yang usianya baru menginjak 17 tahun, dan baru terdaftar sebagai pemilih. Begitupun sebaliknya, ada calon pemilih yang ternyata sudah meninggal dunia pada hari H. Hal-hal seperti itulah yang membuat jumlah DPT terus berubah-ubah.

Selain jumlah DPT yang masih jadi permasalahan di Bali, juga masih adanya Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar menjadi pemilih. Dari informasi yang beredar, ada sekitar 60 WNA yang terdaftar sebagai pemilih. Namun KPU Bali mengaku 35 WNA yang terdaftar sebagai pemilih itu semua sudah dicoret atau dihapus dari daftar pemilih. KPU Bali akan kembali menyalisir sisa WNA yang diduga masih masuk dalam daftar pemilih. ■ **ayu/sf**



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Sofyan Efendi
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra
SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Erman Suhendri, S.Sos.I,
Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Natasya Amanda Prihandini,
S.Kom. Rahayu Setyowati, Muhammad Husen Virgianne Meiske,
Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli,
Singih Rimbani Kinanti, Siti Nadiyah, Riyen Hidayat, Anrimi
Puspa Ratri, Nafisa Hanum Alaydrus,
Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha,
Puntho Pranowo.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah
Gerald Opie.
ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari,
Sunarya, Fahmi Harfa, Nathan Dimas Saminto,
Safitri Restu Widayati. SIP.

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.
ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
DESAIN GRAFIS
Dito Sugito
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E. Barliansyah, Fathurahman
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Foto: Ayu

Hak Politik Narapidana Harus Terpantau



Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi

Hak politik untuk memilih bagi para narapidana atau warga binaan di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) saat Pemilihan Umum (Pemilu) harus terpantau dengan baik oleh penyelenggara Pemilu maupun aparat penegak hukum.

Ini semua agar pesta demokrasi bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. “Untuk Kemenkum HAM agar bisa memastikan hak pilih bagi para warga binaan. Semua mitra kerja Komisi III konsentrasi agar pileg dan pilpres berjalan baik,” seru Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi usai mengikuti

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (20/3).

Jumlah warga binaan pemasyarakatan di Kepri sendiri sudah lebih dari 20 ribu orang per 18 Maret ini. Sebanyak 62,60 persen merupakan warga binaan kasus narkoba, dan 36,05 persen warga binaan dari tindak pidana umum. Hak suara warga binaan tak boleh diabaikan dan perlu pengawasan yang memadai. Apalagi kelak banyak TPS berdiri di sejumlah lapas. Ini tentu membutuhkan perhatian agar keamanan di dalam Lapas juga tetap terjaga di hari pemilihan.

“Kita harapkan Pemilu ini berlangsung jujur, adil, dan terpercaya. Alhamdulillah kita sudah memantau persiapan Pemilu di banyak pulau di Kepri ini,” ungkap Habib, sapaan akrab politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Kapolda Kepri sendiri sebagai pemegang otoritas keamanan di Kepri sudah memberi jaminan bahwa Pilpres dan Pileg di Kepri termasuk di lapas terpantau dengan baik. ■ mh/sf

Komisi IV Dorong Industri Sarang Walet Jadi Komoditas Ekspor Unggulan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong industri sarang walet menjadi komoditas ekspor unggulan di sektor non-migas.

Selain potensi pangsa pasar yang begitu besar, nilai ekonomi sarang walet juga begitu tinggi. “Kita ingin sarang walet bisa menjadi kekuatan ekspor, khususnya di Kalimantan Barat, sehingga bisa menambah kekuatan ekonomi daerah,” papar Daniel di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke PT. Faicheung Birdnest Industry sebagai salah satu eksportir walet di Ketapang, Kalbar, Rabu (20/3).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan komoditas sarang walet sangat menjanjikan, karena tidak semua negara bisa memproduksi sarang walet. Khusus di Ketapang, terdapat lebih dari 2000 rumah walet, di mana 1 rumah bisa memproduksi sarang walet rata-rata 10-15 kg/ bulan.

“Ini potensi serius yang harus



Foto: Anne Jik

dipikirkan, sehingga menjadi pendapatan asli daerah dan otomatis menambah tenaga kerja. Karena itu kita harus sama-sama memikirkan bagaimana 20 ton itu bisa menjadi kekuatan ekspor resmi dari

Ketapang,” kata politisi dapil Kalbar itu.

Dirinya juga mendorong pemerintah untuk aktif memfasilitasi para petani walet dan para eksportir dengan kerja sama yang konkret antarnegara. Mengingat produksi tinggi namun potensi ekspor belum optimal. Seperti halnya di Ketapang, potensi ekspor hanya mencapai 600 kg/ tahun, padahal pasar Tiongkok mampu menyerap 1000 ton/ bulan.

Direktur PT. Faicheung Birdnest Industry David Ringgo menyebutkan, saat ini eksportnya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan di Tiongkok. Ia mengakui bahwa persyaratan sanitary dan phytosanitary

... komoditas sarang walet sangat menjanjikan, karena tidak semua negara bisa memproduksi sarang walet. Khusus di Ketapang, terdapat lebih dari 2000 rumah walet, di mana 1 rumah bisa memproduksi sarang walet rata-rata 10-15 kg/ bulan.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi saat memimpin Tim Kunker mengunjungi gudang milik PT. Alas Petala Makmur, Surabaya

Foto: Erlangga/jk

yang dipersyaratkan karantina Tiongkok cukup memakan waktu dan tenaga.

Karena harus dilakukan penilaian langsung dari otoritas Tiongkok, namun pihaknya sudah melewati semua proses tersebut. Menurutnya fokus saat ini adalah menyediakan bahan mentah sesuai dengan jumlah dan kualitas yang memadai.

Sementara itu, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Badan Karantina Pertanian, Agus Sunanto yakin industri sarang walet akan terus naik, mengingat potensi yang ada dan kebutuhan pasar yang terus meningkat. Dari data pusat Barantan, total ekspor nasional sarang burung walet pada tahun 2018 tercatat dikirim ke 27 negara, dengan total volume sebanyak 1.591,47 ton.

Menurutnya, persaingan harga antar negara juga mempengaruhi jumlah ekspor. "Tujuan Tiongkok memang persyaratan karantinanya lebih susah, tapi harganya juga hampir dua kali lipat, kita akan bantu terbaik untuk petani dan eksportir," jelasnya.

Dari data yang ada perbandingan harga antara tujuan Tiongkok dengan negara lain hampir setengahnya, rata-rata tujuan selain Tiongkok harganya berkisar Rp 25 juta per kilogram, sedangkan tujuan Tiongkok rata-rata Rp 40 juta per kilogram. ■ **ann/sf**

Komisi IV Tinjau Kayu Sitaan dari Papua

Menindaklanjuti laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penanganan kasus illegal logging yang masih marak terjadi, Komisi IV DPR RI meninjau barang bukti hasil operasi peredaran kayu merbau ilegal asal tanah Papua yang disita dan ditahan di gudang milik PT. Alas Petala Makmur, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/3).

Tinjauan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi serta didampingi beberapa Anggota Komisi IV lainnya. Viva menyebut KLHK telah berhasil menyita 387 kontainer kayu merbau ilegal dari Papua dan Papua Barat di Surabaya serta 57 kontainer juga telah berhasil diamankan di Kota Makassar.

"Ini bukti bahwa *illegal logging* masih marak terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada Undang-Undang (UU) yang kita buat bersama pemerintah seperti UU Kehutanan, UU tentang Lingkungan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, tetapi praktiknya di lapangan itu masih berkata

lain," tutur Viva.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyebut bahwa banyaknya fenomena bencana lingkungan terutama banjir bandang yang baru saja terjadi di Indonesia tidak lain disebabkan oleh alih fungsi lahan dan pembalakan liar tersebut. Ia menjelaskan bahwa penggundulan hutan ini merupakan penyakit yang harus dituntaskan oleh para aparat penegak hukum dengan mengikuti ketentuan UU yang berlaku.

"Pemerintah harus terus melaporkan jumlah kasus perusakan lingkungan yang sudah diproses secara hukum. Komisi IV selalu mendukung penegakan hukum dalam rangka untuk penyelamatan hutan yang lestari di Indonesia dan mencegah terjadinya perusakan lingkungan untuk pelestarian lingkungan alam di Indonesia," tambah politisi dapil Jawa Timur X itu.

Menurutnya penegakan hukum terkait perusakan lingkungan seringkali masih terhambat kurangnya penegak hukum terutama polisi hutan. Maka dari itu ia juga mendorong peran dan komitmen masyarakat untuk bekerja sama dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan. "Satu polisi hutan itu masih bertanggung jawab terhadap 100.000 hektar. Untuk itu kami berharap peran masyarakat menjadi penting di sini," pungkas Viva. ■ **er/sf**



Foto: Eko Ijok

Tim Kunker Komisi IV DPR RI dan Dirjen KKP serta jajaran Forum Pimpinan Daerah Boyolali Panen Ikan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Capaian Produksi Perikanan di Boyolali Dinilai Bagus

Komisi IV DPR RI menilai Kabupaten Boyolali memiliki potensi perikanan dengan komoditas unggulan berupa ikan lele, ikan mas, dan ikan nila, serta ikan air tawar jenis lainnya.

Komisi IV DPR RI pun beranggapan produksi perikanan di Boyolali selalu bagus. Pemangku kebijakan di Boyolali dinilai sudah melakukan

langkah-langkah sinergi dan harmonisasi di sektor perikanan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Hal ini tercermin dari pola capaian produksi air tawar yang selalu bagus dalam mensuplai kebutuhan masyarakat Boyolali maupun masyarakat Yogyakarta. Sehingga bermanfaat dalam kesejahteraan pembudidaya ikan,” papar Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Desa Cepokosawit, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (20/3).

Boyolali juga telah mendapatkan berbagai penghargaan lomba, diantaranya Juara II Nasional Lomba Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Juara II Nasional Lomba cipta Menu Ikan Garut Lele, dan Juara I Masak Ikan Kudapan Tingkat Jawa Tengah. Oleh sebab itu, Tim Kunspek Komisi IV DPR RI berkunjung ke Boyolali dalam rangka melihat keberhasilan para pembudidaya ikan.

Selain itu, Komisi IV DPR RI bersama pemerintah memberikan bantuan-bantuan seperti benih ikan, pakan ikan, kartu



KUSUKA, dan bantuan pinjaman modal agar pembudidaya ikan dapat lebih sejahtera lagi sehingga Boyolali diharapkan dapat menjadi teladan dalam kualitas mutu produk perikanan air tawar yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional.

Menurut Ibnu, Kunspek ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional dewan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap program dan kebijakan pemerintah, dengan tujuan untuk mendengarkan penjelasan dan berdialog langsung dengan pembudidaya ikan nila dan ikan mas.

Selain itu, Tim Kunspek Komisi IV DPR RI juga menyerap aspirasi masyarakat dan *stakeholder*, terkait kendala dan hambatan kegiatan budi daya ikan air tawar selama ini, dan bagaimana usulan pengembangannya ke depan. ■ **eko/sf**

Komisi V Kawal Normalisasi Sungai Juwana



Wakil Ketua Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno

Wakil Ketua Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno mengatakan, masyarakat Kabupaten Pati mendambakan normalisasi Sungai Juwana.

Hal ini dianggap sebagai salah satu langkah yang tepat untuk mengurai permasalahan banjir yang terjadi di daerah tersebut.

Melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pati, selain wujud kepedulian kepada masyarakat Pati, juga mengawal normalisasi Sungai Juwana.

“Terkait normalisasi Sungai Juwana ini bahwasannya sejak tahun 2016 hingga 2018 namun belum ada hasil. Pada tahun 2019, sudah dianggarkan sebesar Rp 40 miliar. Insya Allah sudah lelang, dan bulan depan mulai bisa dikerjakan,” ungkap Anton di sela-sela memimpin Kunspek Komisi V DPR RI ke Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Selasa (19/3).

Politisi Partai Demokrat itu memastikan, program normalisasi Sungai Juwana akan dikawal sekaligus diajukan pada tahun 2020, sehingga dapat dianggarkan total serta bertahap. Sementara terkait masalah penambatan kapal di muara Sungai Juwana, menurut Anton itu merupakan wewenang Komisi IV DPR RI.

“Di muaranya itu kan ada kapal nambat, itu wewenang Komisi IV. Kita akan menyampaikan kepada komisi IV untuk memanggil kementerian terkait masalah penambatan ini. Hasil kunjungan ini akan kita bawa dan bahas dengan pemerintah saat rapat di DPR nanti, harapannya aspirasi yang telah disampaikan tadi bisa segera direalisasikan,” tegas legislator dapil Jawa Barat V itu.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pati Haryanto menyampaikan permasalahan di Pati, apabila musim hujan, terjadi kebanjiran, dan apabila kemarau akan terjadi kekeringan. “Semua ini terjadi disebabkan salah satunya karena dilalui bantaran Sungai Juwana yang panjangnya mencapai 61 km mulai dari hulu sampai dengan hilir. Memang beberapa kali dilakukan alokasi normalisasi Sungai Juwana, namun tidak bisa tuntas,” ujar Haryanto.

Menurutnya, apabila normalisasi Sungai Juwan bisa tuntas, bisa menyelesaikan permasalahan rawa-rawa di sekitar bantaran Sungai Juwana yang selama ini belum teratasi. Haryanto juga berharap agar bantuan tidak hanya Rp 40 miliar saja, namun juga ada tindak lanjutnya di tahun 2020. Selain itu, di anggaran perubahan 2019 nanti ada perhatian, sebab penyelesaian permasalahan ini merupakan kebutuhan mendesak. ■ **skr/sf**

Pemanfaatan Potensi Laut Belum Dioptimalkan PT. Perinus

Pasalnya, dengan potensi produksi laut Indonesia yang luar biasa, Komisi VI DPR RI mendapatkan informasi PT. Perinus hanya memanfaatkan hasil tangkap laut sebesar 3 persen.

“Direksi menyampaikan bahwa kebutuhan gurita untuk di Jepang 150 ribu ton per tahun. Ini potensi BUMN Perinus untuk bisa memasok. Itu baru gurita, belum yang lain-lain. Dan itu harus didukung dengan fasilitas daripada kapasitas produksi Perinus,” kata Azam, usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT. Perinus Cabang Makassar, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/3).

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, dari pertemuan dengan Direksi PT. Perinus itu terungkap bahwa pengembangan fasilitas pendukung penambahan bangunan untuk meningkatkan produksi masih menjadi kendala. Karena penggunaan lahan yang saat ini yang dimanfaatkan PT. Perinus Cabang Makassar adalah milik PT. Pelindo IV yang tentunya mengganggu keleluasaan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menegaskan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memperhatikan kinerja PT. Perikanan Nusantara (Perinus), agar kapasitas produksinya menjadi lebih besar.



Tim Kuncker Komisi IV DPR RI mengunjungi PT.Perinus Cabang Makassar

Foto: Arief Ijk

Komisi VI DPR RI mendapatkan sejumlah temuan penyimpangan dari penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh PT. Perikanan Indonesia (Perindo) beberapa tahun terakhir.

Usai menerima paparan dari Dirut PT. Perindo Risyanto Suanda terkait penggunaan PMN, Komisi VI DPR RI berkesimpulan terdapat program PMN senilai Rp 300 miliar yang tidak sesuai dengan *business plan* yang telah ditetapkan. Karenanya, Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti saat Rapat Kerja dengan Menteri BUMN terkait persoalan ini.

“Ada sejumlah temuan yang diperoleh. Yang pertama adalah perubahan peruntukan yang dilakukan PT. Perindo terhadap PMN yang diberikan ini menyimpang dari apa yang mereka ajukan, nanti akan kita tindaklanjuti dan minta pertanggungjawaban terkait secara khusus, siapa yang memberikan

PMN Perindo Menyimpang dari *Business Plan*

persetujuan selanjutnya,” ungkap Anggota Komisi VI Nasril Bahar usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT. Perindo, di Sumatera Utara, Selasa (19/3).

Nasril mengungkapkan, dari sebelas item perencanaan ada tiga item dalam implementasi PMN yang tidak sesuai dengan *business plan*. Sehingga ini menjadi kesimpulan rapat yang dibahas selama satu jam tersebut. Sebagai pengawas BUMN, Komisi VI DPR RI tentunya akan menindaklanjuti persoalan item perencanaan itu sesuai Pemilu 2019 berlangsung.

“Terdapat keadaan yang tidak sesuai. Dari 11 item, ada 3 item yang tidak sesuai dengan *business plan*. Tentunya ini jadi pertanyaan. Nanti kita akan panggil ke Jakarta, sebagai pertanggungjawaban (PMN) yang digunakan,” tegas legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu.



Foto: Hendra Ijk

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar

berusaha PT. Perinus.

“Harus ada sinergi antara Perinus dengan Pelindo IV. Informasi dari Direksi Perinus pada beberapa tahun yang lalu, lahan ini disewakan kepada swasta oleh Pelindo IV. Oleh karena itu, kita usul kepada Kementerian BUMN untuk segera menarik lahannya dan segera dipakai Perinus untuk meningkatkan kapasitasnya. Sehingga, Perinus juga menjadi besar dan menguntungkan untuk Kementerian BUMN,” tandas Azam.

Tim Kunspek Komisi VI DPR RI menilai kinerja PT. Perinus masih di bawah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kendati PT. Perinus (Persero) merupakan BUMN hasil penggabungan 4 BUMN Perikanan, yaitu PT. Usaha Mina (Persero), PT. Tirta Raya Mina (Persero), Perikanan Samodra Besar (Persero), dan PT. Perikani (Persero), namun fasilitas yang dimiliki masih kecil, sehingga belum maksimal memupuk pendapatan.

“Harapan dari Komisi VI kepada perusahaan BUMN yang dimiliki oleh pemerintah, agar menjadi lebih besar dan memiliki potensi besar. Kita juga meminta kepada Direksi Perinus untuk memperbaiki pola plasma, serta melakukan pembinaan kepada para nelayan di Sulawesi Selatan,” harap Legislator Dapil Jawa Timur III ini.

■ afr/sf

Nasril mengungkapkan, potensi laut di Indonesia sangat besar, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara maksimal. PT. Perindo selaku BUMN yang bergerak di bidang perikanan tentunya memiliki tugas besar dalam memanfaatkan potensi alam tersebut. PMN sebagai suntikan modal seyogyanya harus dikelola secara terencana dan tepat sasaran guna mencapai hasil maksimal.

“Potensi ikan kita cukup besar. Maka sebenarnya PMN untuk PT. Perindo senilai 300 miliar ini tidak cukup, namun tetap kami ke perusahaan ini untuk melihat sejauh mana pemanfaatan dari pada PMN tersebut, apakah sesuai dengan *business plan*,” terang legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Sementara itu, Dirut PT. Perindo Risyanto Suanda mengungkapkan, pihaknya siap jika dalam beberapa waktu ke depan diminta penjelasannya saat RDP dengan Komisi VI DPR RI. Namun secara keseluruhan, PT. Perindo mengapresiasi Komisi VI DPR RI atas perhatian dan perjuangannya dalam upaya mendorong BUMN menjadi lebih baik. ■ hs/sf

Komisi V Tinjau Pengembangan Bandara Trunojoyo

Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meninjau langsung pengelolaan dan pengembangan infrastruktur Bandara Trunojoyo, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

Sejumlah catatan diberikan oleh Tim Kunspek Komisi V DPR RI terkait pembangunan infrastruktur Bandara Trunojoyo ini, salah satunya akses jalan menuju bandara yang sangat sempit.

“Kami ingin melihat secara langsung kinerja mitra Komisi V DPR RI, khususnya di Sumenep, dan kebetulan di Sumenep ini ada pembangunan Bandara Trunojoyo. Kami lihat langsung pembangunannya. Kami mencatat, akses jalan menuju bandara sangat sempit, jalannya rusak, dan pengelolaan bandara juga kurang maksimal,” kata Sigit usai memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Bandara Trunojoyo, Sumenep, Selasa (19/3).

Catatan lain yang perlu mendapat perhatian seperti pembangunan terminal penumpang, dan perlunya perluasan akses jalan menuju bandara tersebut. “Untuk Bandara Trunojoyo Sumenep, tahun ini akan membangun terminal penumpang, karena kapasitas penumpang ruang tunggu saat ini hanya berkapasitas antara 60-70 orang, jadi sangat terbatas,” kata Politisi Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain itu katanya, ia menilai kurangnya perhatian dari pusat, akses jalan menuju bandara yang sempit dan rusak, pengelolaan bandara yang kurang maksimal, dan jumlah penumpang yang sedikit, sehingga menyebabkan Bandara Trunojoyo Sumenep itu lambat berkembang. Imbasnya, operator penerbangan yang bekerjasama dengan bandara ini cukup sedikit. Untuk itu, pihaknya mendorong percepatan pengembangan infrastruktur pembangunan di bandara ini.

“Untuk mengundang operator maskapai penerbangan supaya tertarik bekerjasama dengan bandara ini, harus adanya kerja sama pengelola bandara dengan pemerintah daerah setempat, misalnya dengan mengadakan acara besar kebudayaan dan pengenalan pusat wisata di Sumenep sehingga dapat menarik orang untuk datang ke sini. Hal ini akan meningkatkan jumlah penumpang pesawat, sehingga operator pesawat akan tertarik untuk bekerjasama dengan bandara Trunojoyo,” jelas Sigit.

Lebih lanjut, Legislator dapil Jawa Timur itu menjelaskan, untuk perluasan bandara Trunojoyo dibutuhkan pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu merupakan wewenang dan kewajiban pemerintah daerah. “Jangan sampai pembebasan lahan berbentur dengan warga dan masyarakat sekitar. Untuk itu, perlu adanya pendekatan khusus dalam hal tersebut,” pesan Sigit.

■ man/sf



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo (tengah)

Foto: Andri | jk

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengatakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memang sudah memberikan perhatian dalam menangani masalah kekurangan gizi terutama *stunting*.

Namun ia berpesan agar semua *stakeholder* bersama dengan masyarakat NTB untuk saling bersinergi dalam menuntaskan masalah *stunting* yang juga merupakan program nasional ini.

Pesan tersebut diungkapkan Erma, sapaan akrabnya, saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB beserta *stakeholder* bidang kesehatan dalam rangka pengawasan terhadap penanganan anak gizi buruk dan anak *stunting*, di Mataram, NTB, Selasa (19/3).

“Peran serta dari semua *stakeholder* harus terus ada. Mulai dari tenaga medis kemudian pemerintah daerah juga masyarakat. Kita sudah dengarkan bahwa partisipasi masyarakat NTB luar biasa. Beberapa kebijakan

Perlu Sinergi Tuntaskan *Stunting* di NTB



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena bertukar cenderamata dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB

pemerintah daerah yang diintegrasikan dengan program-program besar, maupun bantuan yang terstruktur kepada daerah tertentu itu tidak berdampak cukup signifikan tanpa adanya sinergi,” terang Erma.

Ia berharap Pemprov NTB membuat peraturan daerah (perda) yang mengharuskan adanya tindakan-tindakan yang ekstrem untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah *stunting* yang ada di NTB. Sehingga Indeks Pembangunan

Panja Limbah Temukan Penyimpangan Pengelolaan Limbah di Riau

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menemukan penyimpangan atas kejadian tumpahan limbah pada pembuangan limbah terakhir dan tidak adanya pengelolaan limbah yang benar yang dilakukan First Resources Group dan Group Asia Pacific Resources International Limited (APRIL Group).

“Kami minta kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) KLHK untuk melakukan proses hukum. Perusahaan ini harus menaati



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat memimpin Tim Panja Limbah dan Lingkungan di Riau

Manusia (IPM) di NTB bisa naik menjadi ranking ke-28. Diketahui pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, IPM di NTB berada pada ranking ke-29.

“Harus terus meningkatkan program-program inovatif. Saya tahu persis bahwa di Lombok Barat sudah memberikan tablet zat besi kepada seluruh anak-anak usia produktif. Usia produktif itu pada usia setingkat SMP dan SMA untuk mengatasi anemia. Kalau anemia ini teratasi, maka menjadi lebih sempurna,” terang politisi fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Selanjutnya, Erma ingin melihat ada intervensi terhadap pola asuh anak. Diketahui pernikahan dini di NTB masih sangat tinggi dan konsekuensinya adalah putus sekolah. Dari segi emosional juga ekonomi dapat dipastikan belum siap, tentu hal ini akan berdampak pada pola asuh anak-anaknya kelak. “Mereka belum mengerti bagaimana mengasuh anak, belum mengerti memilih makanan yang cocok untuk anak-anak,” pungkask Legislator Dapil NTB ini.

Kunjungan Kerja Spesifik ke NTB ini juga diikuti oleh Anggota komisi IX DPR RI Imanuel Ekadius Blegur dan Julianus Pote Leba dari Fraksi Partai Golkar, Sumarjati Arjoso dari Fraksi Partai Gerindra serta Muhammad Iqbal dari Fraksi PPP. ■ **es/sf**

hukum yang berlaku. Kalau memang harus diberhentikan atau diberikan sanksi hukum, saya persilakan kepada Ditjen Gakkum,” jelas Nasir, usai memimpin Tim Kunspek Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau, Rabu (20/3).

Usai menggelar pertemuan dengan Direksi First Resources Group, Tim Panja Limbah dan Lingkungan meninjau tempat pembuangan limbah terakhir di PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), anak perusahaan APRIL Group. Dari peninjauan, Nasir menilai, perusahaan tersebut tidak menaati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan baik.

“Kami melihat dan mendapatkan beberapa tumpukan limbah di area pembuangan limbah terakhir (landfill). Kami melihat dan memastikan apakah tumpukan limbah ini berbahaya atau tidak. Tapi yang jelas ini semua tidak ada pengelolannya sampai sekarang,” jelas Politisi Partai Demokrat itu. Alhasil, dalam waktu yang bersamaan, *landfill* yang telah melanggar ketentuan tersebut langsung disegel oleh Ditjen Gakkum. ■ **cas/sf**

Anggaran BPOM Masih Minim

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebenarnya memiliki fungsi dan tugas yang sangat besar, namun untuk melaksanakan fungsi dan tugas yang besar tersebut anggaran BPOM masih sangat minim.

Pada fungsi BPOM adalah preventif dari Kementerian Kesehatan dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Hal tersebut

diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago, saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan BPOM Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pengawasan terhadap peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, di Palembang, Sumsel, Selasa (19/3).

“Pemerintah memberikan anggaran kuratif untuk pengobatan kepada masyarakat Indonesia. Tentu tidak bisa mencukupi jika masyarakat tidak terjaga kesehatannya. Maka dari itu, Komisi IX datang ke BPOM Sumatera Selatan untuk mendapatkan informasi sebesar-besarnya fungsi BPOM dalam melayani pengawasan obat dan makanan di masyarakat,” tutur Irma.

Dalam pertemuan tersebut, Legislator Dapil Sumsel itu menjelaskan pentingnya mempunyai laboratorium keliling di setiap kabupaten dan kota. Laboratorium keliling tersebut nantinya berfungsi untuk menguji di tempat, berbagai kandungan makanan atau minuman yang dijual oleh pedagang atau masyarakat, dan hasil pengujiannya bisa cepat diketahui.

“Kami dari Komisi IX mendukung adanya laboratorium keliling dan serta mendukung adanya kenaikan anggaran BPOM. Saya juga sudah menyampaikan ke Gubernur untuk bisa menganggarkan laboratorium keliling dari pemerintah daerah ataupun dari pusat. Itu semua untuk mendukung tugas BPOM supaya bekerja dengan baik,” tutur Legislator F-NasDem ini.

Dukungan penganggaran laboratorium tersebut juga disampaikan



Foto: Ryan Jik

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari. Menurut Politisi F-Gerindra itu, laboratorium keliling yang dimiliki BPOM di seluruh Indonesia masih sangat terbatas dan belum bisa menjangkau semua kabupaten.

“Adanya kasus temuan jajanan anak-anak yang tidak layak ataupun produksi-produksi industri rumah tangga yang tidak layak konsumsi masih banyak sekali, kedepan kami akan mensupport kenaikan anggaran BPOM untuk menambah jumlah laboratorium keliling,” tutur Legislator Dapil Jawa Barat VII itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar POM Provinsi Sumatera Selatan Hardaningsih mengeluhkan lemahnya hukuman terhadap pelaku usaha yang telah berbuat curang dalam dunia usaha masih sangat lemah hukumannya sehingga tidak menimbulkan efek jera.

“Kami sudah sering melakukan operasi pasar dan mengecek setiap kandungan dalam makanan ataupun kosmetik yang beredar. Tapi ketika kami menemukan pelaku usaha yang berbuat curang, hukuman diberikan oleh pengadilan masih sangat rendah, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku usaha tersebut,” tutur Hardaningsih. ■ **rh/sf**

Harus Ada Solusi Hadapi Masifnya Penambangan Liar

Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan mengaku prihatin atas musibah longsornya tambang emas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Bara menegaskan, insiden tersebut harus menjadi suatu peringatan yang kuat bagi semua pihak untuk mencari solusi yang komprehensif terhadap aktivitas penambangan liar yang sangat masif terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

“Perlu ada satu solusi yang komprehensif untuk mengantisipasi persoalan ini. Solusi tersebut bukan hanya soal penertiban, tetapi bagaimana kita bisa membantu memfasilitasi pencarian solusi, sehingga rakyat yang tinggal di sekitar tambang bisa memiliki kesempatan untuk mengelola dan menikmati hasil dari kandungan mineral

yang ada di daerah mereka tinggal,” ucap Bara saat memimpin Kunjungan Kerja Sepsifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (21/3).

Bara menambahkan, jika melihat lokasi kejadian, seharusnya tidak boleh dilakukan penambangan. Menurutnya, medannya sangatlah berbahaya. Mengingat kondisi

tanahnya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penambangan. Tanahnya sangat labil, sehingga sangat berpotensi terjadi musibah longsor. Untuk itu, ia mengimbau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar dapat menyiapkan pemetaan terhadap berbagai lokasi penambangan liar di seluruh Indonesia dan mencari solusi atas permasalahan itu.

“Satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah apa yang diterapkan di Bangka Belitung, dengan melibatkan PT. Timah. Dimana pada waktu itu penambangan liar sangat luar biasa dan lokasinya berada di dalam konsesi PT. Timah. Solusi yang didapat pada waktu itu adalah PT. Timah bekerjasama dengan para penambang liar, dengan syarat para penambang itu harus menjual hasil penambangannya kepada PT. Timah,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Opsi lain menurut legislator dapil Sulawesi Utara itu adalah dengan memberikan kesempatan kepada rakyat



Tim Kunspek Komisi VII DPR meninjau tambang emas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

yang melakukan penambangan liar untuk diberikan izin penambangan rakyat yang memang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Hal ini dapat membantu kita untuk melakukan sesuatu yang konkret dalam mendorong legalisasi penambangan liar yang terjadi di seluruh Indonesia. Karena kalau hanya melakukan penegakan hukum tanpa memberikan solusi kepada mereka yang selama ini melakukan penambangan tanpa izin, maka itu bukanlah solusi,” tegasnya.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menyatakan, kegiatan penambangan liar tanpa izin jelas tidak memenuhi standar-standar yang ada, yakni standar keselamatan dan standar lingkungan hidup. “Itu adalah dua aspek standar yang sangat penting sekali dalam penambangan. Terjadinya penambangan liar juga diakibatkan kurangnya pengawasan dari institusi terkait,” pungkasnya. ■ **azk/sf**



Foto: Azka IJK

Baleg DPR Terima Masukan Prolegnas Prioritas 2019



Foto: Ayu IJK

Ketua Baleg DPR RI Sudiro Asno bertukar cenderamata dengan Wagub Kaltim

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima sejumlah masukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, civitas akademika beberapa perguruan tinggi di Kaltim, serta berbagai organisasi masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019. RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2019 terdiri 12 RUU baru dan 43 RUU dari RUU Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya.

“Masukan tersebut adalah harapan semua pihak agar beberapa RUU segera diselesaikan. Salah satunya RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang pembahasannya sudah cukup lama. RUU ini diperlukan sebagai induk hukum pidana ke depannya. Mengingat Undang-Undang KUHP selama ini merupakan produk hukum warisan Belanda,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI Sudiro Asno usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (18/3).

Selain itu juga, Baleg DPR RI juga menerima masukan dari kalangan akademisi Universitas Tujuh Belas

Agustus (Untag) Kaltim tentang RUU Masyarakat Adat. Mereka berharap agar lebih hati-hati membahas RUU ini, karena ada banyak hak masyarakat adat yang harus dilindungi, dan tidak boleh tergerus oleh arus modernisasi. Namun di sisi lain, RUU tersebut juga akan bersinggungan dengan RUU Pertanahan dan Undang-Undang Kehutanan.

Tidak hanya itu, RUU Desain Industri yang menjadi salah satu dalam RUU Prolegnas Prioritas 2019 ini juga diharapkan bisa melindungi hak kekayaan intelektual atas motif-motif asli Kaltim. Hal itu juga bukan tidak mungkin dapat semakin mendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang notabene dilakukan oleh masyarakat Kaltim.

Pada kesempatan itu, Sudiro juga menjelaskan bahwa DPR RI akan menampung semua masukan tersebut, sambil berusaha dan mendorong koleganya sesama Anggota DPR RI untuk terus membahas dan menyelesaikan berbagai RUU Prolegnas Prioritas 2019 tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tercantum salah satu fungsi DPR RI adalah legislasi, di samping fungsi pengawasan dan anggaran. ■ **ayu/sf**

Komisi X DPR RI perlu mendapatkan dukungan data dari berbagai sumber di daerah, untuk melakukan fungsi pengawasan dan mengevaluasi capaian kinerja pemerintah bidang ekonomi kreatif, melihat secara langsung pengembangan ekonomi kreatif, serta untuk melakukan kajian terhadap materi muatan Rancangan Undang-undang tentang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) dan memperkaya perspektif dalam pembahasannya.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat diterima Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam rangka meninjau infrastruktur, sistem pendanaan, pendampingan dan hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif, di Balai Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/3).

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan bahwa Komisi X DPR RI mendapat tugas untuk membahas RUU Ekraf bersama wakil dari Pemerintah yaitu: Menteri Perdagangan RI; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI; Menteri Pariwisata RI; Menteri Koperasi dan UKM RI; Menteri PAN dan RB RI; dan Menteri Hukum dan HAM RI.

“DPR RI bersama Pemerintah telah menetapkan RUU Ekraf masuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019, masuk dalam RUU Prioritas tahun ini. Penetapan ini tidak lepas dari fakta bahwa ekonomi kreatif, telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan di berbagai negara, termasuk di Indonesia,” imbuh Djoko.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), selama kurun waktu 2010 hingga 2015, besaran PDB ekonomi kreatif naik dari Rp 525,9 triliun pada 2010 dan menjadi Rp 852,2 triliun pada 2015 atau meningkat rata-rata 10,14 persen per tahun.

Begitu pula pada tahun 2010 hingga 2015, sektor tenaga kerja ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan sebesar 2,15 persen, dimana jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif pada tahun 2015 sebanyak 15,9 juta orang.

Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif juga akan tumbuh, diperkirakan



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto bersama Wali Kota Surabaya

Komisi X Himpun Masukan RUU Ekraf di Surabaya

tahun 2019 mencapai 17,2 juta orang. Sedangkan nilai ekspor bruto diperkirakan mencapai 21,5 miliar dollar AS. Konsistensi kenaikan ini menyebabkan ekonomi kreatif unggul atas sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik dan gas; konstruksi pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, real estat, dan jasa perusahaan.

“Sektor ekonomi kreatif mampu menempati urutan 4 serapan tenaga kerja terbesar dari 10 sektor ekonomi nasional. Namun demikian, untuk mewujudkan target capaian ini, harus ditopang dengan iklim usaha nasional yang kondusif dengan regulasi, yang berpihak kepada industri ekonomi kreatif,” tandas politisi dapil Jateng III ini.

Djoko juga berharap para pemangku kepentingan dan berbagai kalangan masyarakat pelaku ekonomi kreatif dan akademisi di Kota Surabaya memberikan masukan penting terkait pengelolaan ekosistem ekonomi kreatif dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

“Regulasi seperti apa yang diperlukan dalam mengelola dan mengawasi pengembangan ekonomi kreatif. Apa usulan

pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif di Surabaya dan dari para pakar, utamanya mengenai infrastruktur, sistem pendanaan, pendampingan, dan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif,” pungkas Djoko.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan ekonomi kreatif merupakan industri yang berkembang pesat di Surabaya dan *sustainable* (berkelanjutan). “Sejak awal menjadi Wali Kota saya masuk dan belajar tentang seluk beluk industri kreatif ini. Dan alhamdulillah saat ini di Surabaya ekonomi kreatifnya sudah bergerak dan berkembang sangat pesat,” jelasnya.

“Sektor ekonomi kreatif mampu menempati urutan 4 serapan tenaga kerja terbesar dari 10 sektor ekonomi nasional. Namun demikian, untuk mewujudkan target capaian ini, harus ditopang dengan iklim usaha nasional yang kondusif dengan regulasi, yang berpihak kepada industri ekonomi kreatif,”



Terkait permodalan, Risma, sapaan akrab Wali Kota perempuan dengan segudang prestasi ini membuat terobosan dengan jemput bola terkait hal-hal teknis perihal permodalan dengan menghubungkan (membuka link) para pengusaha UMKM dengan dunia perbankan nasional.

“Yang utama itu mereka (UMKM) kita bantu mengakses dunia perbankan bukan saja dalam bentuk modal uang tapi bisa dalam bentuk bantuan barang melalui CSR. Modal itu tidak mesti berbentuk uang, bisa dalam bentuk dukungan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang akan memulai usaha ekonomi kreatif,” papar Risma.

Risma menekankan bahwa jika permodalan dalam bentuk uang, sementara pelaku ekraf pemula belum punya gambaran jenis usahanya apa serta bagaimana manajemen keuangan yang baik maka mereka justru bisa terjebak pada hutang bank sementara usahanya belum cukup berkembang sehingga belum siap.

“Di Surabaya biasanya mereka memulai usaha lebih dulu sesuai kemampuan, hingga pada saatnya mereka mendapatkan pesanan dalam jumlah besar barulah mereka kita dorong mendapatkan dukungan dari dunia perbankan. Kita bantu mereka mencari solusi permodalan hingga omsetnya saat ini ada yang sudah mencapai Rp 1 miliar,” tutupnya bangga. ■ **ojs/sf**

PSBI Diharapkan Jaga Kestabilan Komoditas Barang

Bank Indonesia (BI) memiliki tugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang tergambar dalam kurs dan inflasi.

Untuk menjaga inflasi di daerah, BI mengadakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Dimana dalam penyaluran PSBI tersebut, BI harus berperan menjaga kestabilan komoditas barang, terutama barang yang menjadi penyebab inflasi.

Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat barang yang menjadi penyebab inflasi salah satunya adalah bawang merah. Untuk itu, BI berperan membina petani bawang merah guna menjaga kualitas dan produktivitas. Guna melihat dan mendengar secara langsung manfaat dari PSBI tersebut, Komisi XI DPR RI pun menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke Solok, Sumbar.

Saat pertemuan dengan kelompok tani bawang merah di Solok, Selasa (19/3), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengatakan pihaknya mendapat empat temuan yang disampaikan kelompok bawang merah penerima PSBI. Temuan pertama soal harga yang cenderung turun saat panen. Kedua, soal produktivitas bawang merah.

“Satu kilo bibit dapat menghasilkan 8 kilogram hingga 15 kilogram bawang merah. Namun belum semua kelompok petani bawang merah mampu menghasilkan 15 kilogram. Untuk itu, kita mendorong pemda didampingi BI untuk meningkatkan produktivitas,” jelas politisi Partai Demokrat itu.

Temuan ketiga, persoalan pupuk subsidi yang terbatas, padahal kebutuhan masyarakat cukup banyak. Dan keempat, persoalan modal untuk mengembangkan kelompok tani tersebut. “Kalau memang kebutuhannya banyak, pemda sedari awal harus sudah menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Terkait modal, saya rasa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa menjadi solusi,” imbu Marwan.

Diakhir pertemuan, legislator dapil Lampung II itu mengatakan masukan yang diterima akan menjadi bahan diskusi dengan kementerian terkait, untuk dicarikan solusi terbaik agar komoditas tersuplai dengan baik, inflasi terkendali dan masyarakat bergairah menanam



Foto: Ria Ijok

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan

karena harga yang stabil. “Kami akan mengawal dan memperjuangkan apa yang disampaikan para kelompok tani ini,” komitmen Marwan.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Admaizon menyampaikan, ketahanan pangan strategis diperlukan untuk memastikan kondisi pasokan komoditas pangan strategis terpenuhi di masyarakat. Beberapa komoditas pangan strategis di Sumbar tercermin melalui kontribusinya sebagai komoditas penyumbang inflasi, antara lain cabai, bawang merah, dan beras.

Khusus bawang merah, masih kata Admaizon, Sumbar sebagai sentra produksi bawang merah terbesar di Sumatera, memiliki peran strategis dalam memenuhi ketersediaan pasokan bawang merah. Baik di dalam Sumbar maupun daerah lain.

Produksi bawang merah Kabupaten Solok Pada tahun 2016 tercatat sebesar 59.045 ton dengan luas tanah 5.518 hektar. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan produksi bawang merah sebesar 82.685,2 ton dengan luas tanam 7.919 hektar.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi (F-Golkar/Jawa Timur IV), Willgo Zainar (F-Gerindra/Nusa Tenggara Barat), Refrizal (F- PKS/Sumatera Barat), dan Anarulita Muchtar (F-NasDem/Bengkulu).

■ **rmm/sf**



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bersama Wakil Walikota Malang

Foto: Sofyan Jk

Skema Pendanaan Ekraf Belum Capai Titik Temu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, skema pendanaan atau pemberian bantuan untuk mendukung sektor ekonomi kreatif (ekraf) dalam Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) belum mencapai titik temu.

Sampai sekarang, lembaga perbankan, non-perbankan maupun bursa saham, belum bisa memberikan pendanaan kepada ekraf. Ekraf berbasis hak kekayaan intelektual, sehingga belum bisa dijadikan agunan guna mendapatkan bantuan permodalan.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melihat usaha dari aset. Sementara aset sektor ekraf tidak ada, karena aset mereka itu pada ide dan kreatifitas. Hal itu yang belum selesai dibahas di Panja RUU Ekraf, dan menjadi masukan dari pemerintah,” kata Fikri saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Wali Kota Malang beserta jajaran dan pelaku ekonomi kreatif, di Balai Kota

Malang, Jawa Timur, Selasa (19/3).

Politisi PKS itu mengatakan, dalam memberikan bantuan pendanaan kepada sektor ekraf, OJK mengingatkan agar mengikuti regulasi yang ada. Namun regulasinya kini sedang disusun oleh Komisi X DPR RI. Fikri menambahkan, meskipun skema pendanaan ini sangat teknis, namun ia tak memungkiri hal itu akan masuk dalam RUU Ekraf. Menurutnya, bisa saja nanti bentuk pendanaannya menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Terkait pendanaan itu, Pemerintah Kota Malang sudah melakukan beberapa eksperimen. Namun kemudian menemui kendala ketika akan memberikan bantuan dan dukungan kepada sektor ekraf. Fikri mengatakan, jika bantuan itu diberikan secara hibah, namun bantuan hibah tidak bisa diberikan kepada perorangan dan tidak bisa secara terus menerus. Bantuan hibah harus diberikan kepada lembaga.

“Hibah itu skema atau pola yang susah untuk diterapkan dalam memberikan dukungan pendanaan terhadap pelaku ekraf. Pemkot Malang mengusulkan, skema pendanaan itu menjadi DAK. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sudah mencoba menggunakan

DAK, dengan skema tugas pembantuan atau dana dekonsentrasi, tetapi masih ditolak oleh Kementerian Keuangan. Sehingga skema DAK ini menjadi usulan baru yang nanti akan dibahas di Panja,” jelas Fikri.

Di sisi lain, legislator dapil Jawa Tengah IX itu mengapresiasi perkembangan ekraf di Kota Malang. Bahkan banyak potensi ekraf di Kota Malang yang potensial untuk dikembangkan. Bahkan, inovasi dan kreasi yang diciptakan pelaku ekraf di Kota Malang, bukan hanya mendapat penghargaan tingkat regional dan nasional, tapi juga tingkat dunia. Selain bertemu dengan jajaran Pemkot Malang, Tim Kunspek Komisi X DPR RI juga meninjau markas Malang Creative Fusion (MCF), yang selama ini sudah bekerjasama dengan Pemkot Malang dalam mengembangkan sektor ekraf.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, Pemkot Malang sangat serius dalam mengembangkan potensi ekraf. Sehingga ia berharap, sektor yang diprediksi akan menjadi penerima devisa terbesar itu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. “Wali Kota Malang sudah memiliki *roadmap* besar tentang ekraf. Semoga dengan ini bisa lebih perhatiannya,” harap Sofyan. Sementara itu, Sekda Kota Malang menambahkan, Kota Malang menargetkan akan menjadi kota kreatif skala dunia pada tahun 2023.

■ sf

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI dipimpin Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani memantau ketersediaan beras yang ada di Provinsi Sumatera Barat, baik itu stok beras maupun pendistribusiannya.

Komisi VI DPR RI sebagai mitra kerja Badan Urusan Logistik (Bulog) juga telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah lainnya di Indonesia, guna memantau ketersediaan stok beras.

“Jadi, dari laporan di beberapa daerah termasuk di Sumbar, ketersediaan kebutuhan beras di beberapa gudang aman. Dan, tidak ada kekurangan.

Termasuk stok beras di gudang-gudang di Indonesia aman, tidak ada yang mesti ditakuti untuk kekurangan ketersediaan beras,” ungkap Hamdhani usai memimpin Tim Kunspek Komisi VI DPR RI meninjau Gudang Divre Bulog Sumbar, di Padang, Selasa (19/3).

Komisi VI Pantau Stok Beras di Sumbar

Kemudian, kata Hamdhani, pengecekan ke Gudang Bulog ini juga untuk menghindari adanya distribusi beras yang sudah kadaluarsa. “Jangan sampai ada beras yang sudah kadaluarsa, apalagi pada Rastra. Negara tidak boleh memberikan beras yang kadaluarsa kepada masyarakat, seperti berkontaminasi dan sudah menguning. Makanya kami lakukan pengecekan di setiap gudang, termasuk di Sumbar ini,” lanjutnya.

“Jadi, dari laporan di beberapa daerah termasuk di Sumbar, ketersediaan kebutuhan beras di beberapa gudang aman. Dan, tidak ada kekurangan. Termasuk stok beras di gudang-gudang di Indonesia aman, tidak ada yang mesti ditakuti untuk kekurangan ketersediaan beras.”

Terkait impor beras, legislator Partai NasDem ini menyebutkan impor diperbolehkan, namun harus melihat situasi dan ketersediaan stok. Kuota impor pun harus diatur supaya tidak membuat harga beras produksi petani menurun. “Kalau tahun ini impor, kuotanya paling 15 persen. Presiden pun sudah arahkan agar tidak banyak impor. Kecuali untuk memenuhi kebutuhan hari besar, seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun baru,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divre Bulog Sumbar Muhamad Anwar menyebutkan untuk stok ketersediaan beras di gudang Bulog Sumbar aman untuk 3 bulan ke depan. Karena saat ini ketersediaan beras di Gudang Bulog kurang lebih 6.300 ton. “Pokoknya stok kita aman. Jika kurang kita akan tambah lagi ketersediaan beras ini. Karena, kita ingin kebutuhan beras bagi masyarakat Sumbar mencukupi dan tidak kekurangan,” jelas Anwar. ■ eno/sf



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI memantau ketersediaan beras di Gudang Divre Bulog Sumbar

Petani Bawang Merah Minta Pemerintah Jaga Kestabilan Harga



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno

Foto: Dep Jik

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan, di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, bawang merah merupakan salah satu komoditas yang sangat penting keberadaannya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Oleh karenanya pemerintah diharapkan bisa menjaga kestabilan harga bawang merah dengan tetap mempertimbangkan harga pokok produksinya.

“Petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk meminta agar pemerintah menjaga kestabilan harga bawang merah. Pemerintah jangan doyan impor, karena

hal ini bisa berbahaya,” tandas Soepriyatno usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan masyarakat penerima Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kluster bawang merah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/3).

Dikatakannya, jangan karena inflasi, harga bawang merah hasil produksi petani langsung dihancurkan dengan kebijakan pemerintah yang mengimpor bawang merah secara besar-besaran. “Akibatnya banyak bawang merah hasil produksi para petani menjadi tidak laku. Kebijakan impor oleh pemerintah tersebut akan menghancurkan hasil produksi dalam negeri. Kita harus memproteksi pertanian dalam negeri, supaya semua kebutuhan bisa kita penuhi,” ujarnya.

Masalah pangan merupakan urusan yang sangat strategis, sambungnya, oleh sebab itu kita jangan sampai

MKD Dibentuk untuk Jaga Kehormatan Dewan

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Muhammad Syafi'i mengatakan MKD dibentuk dengan tujuan menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Anggota DPR RI.

Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik juga mengatur persoalan kelembagaan negara, misalnya Anggota DPR RI tidak boleh mencampuri kegiatan kenegaraan secara langsung dalam arti mengintervensi kebijakan, termasuk dalam penegakan hukum.

Romo, sapaan akrab Syafi'i menambahkan, agar setiap Anggota DPR RI memiliki kehormatan, martabat serta keluhuran, harus memantaskan dirinya sebagai Anggota DPR RI sesuai dengan aturan Kode Etik. “Anggota DPR RI tidak boleh memasuki dunia malam. Kenapa karena itu tidak pantas dilakukan oleh Anggota DPR RI,” katanya saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja MKD DPR RI dalam rangka sosialisasi MKD dengan Kapolda dan Kepala Kejaksaan

Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan, di Aula Bhayangkari Mapolda Kalsel, Selasa (12/3).

Kemudian tentang kemasyarakatan, lanjut politisi Partai Gerindra ini, Anggota DPR RI dilarang untuk membuat *deal-deal* yang berbentuk proyek kerja yang menggunakan anggaran, terutama APBN untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Setiap Anggota DPR RI juga secara pribadi harus menampilkan dirinya sebagai pejabat negara dan harus berpakaian rapi tidak boleh berpakaian sembarangan. “Kita ingin Anggota DPR berpenampilan, berdisiplin dan pantas sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas-tugas legislatif,” imbuhnya.

Romo juga mengingatkan bahwa setiap Anggota Dewan harus mendisiplinkan dalam melaksanakan tugas di DPR RI. Misalnya, jika tidak menghadiri 30 persen Rapat Paripurna atau rapat Alat



Anggota MKD DPR RI Muhammad Syafi'i

Foto: Agung Jik

Kelengkapan Dewan (AKD) dalam satu masa sidang, itu sudah dianggap melanggar kode etik. Terkait kehadiran Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna, menurut Romo ada persoalan mengenai penjadwalannya.

“Dulu Rapat Paripurna tetap dilaksanakan pada hari Selasa, sehingga AKD tidak boleh membuat agenda di hari yang sama. Sehingga dapat dipastikan pada hari Selasa semua anggota DPR RI *standby* untuk mengikuti Rapat

bergantung pada impor. “Selain itu, para petani bawang merah di Nganjuk juga mengharapkan agar kualitas hasil produksi pertanian mereka bisa ditingkatkan dan memiliki varietas yang bagus dan unggul,” ucap politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Soepriyatno menyampaikan, lahan di Indonesia banyak yang subur. Apabila harga bawang bagus, pasti hasil pertanian bawang merah juga akan banyak. “Kalau pertanian bawang merah tersebut banyak dan sentra bawang merahnya juga besar, maka produksi bisa kita penuhi, dan kita bisa swasembada,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan, implementasi PSBI di Nganjuk sudah sangat bagus. PSBI tidak bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada, karena PSBI hanyalah stimulus. “Yang bekerja untuk menyelesaikan masalah yang ada itu harusnya Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, karena merekalah yang memiliki anggaran besar. Menteri Perdagangan harus bisa memasarkan hasil produksi Indonesia ke luar negeri, bukan memasarkan produk luar negeri ke Indonesia. Itu salah kaprah namanya,” pungkasnya. ■ **dep/sf**

Pariwisata. Tapi saat ini menjadi agak sulit, karena selalu saja Rapat Paripurna berbenturan dengan rapat AKD di luar gedung DPR, juga berbenturan dengan kegiatan panja atau pansus,” jelasnya.

Imbasnya, masyarakat menilai seolah-olah Anggota DPR RI tidak menghadiri Rapat Paripurna, padahal pada saat yang sama juga melaksanakan tugas-tugasnya di luar Gedung DPR RI. Apalagi menurutnya, saat ini undangan Rapat Paripurna cenderung mendadak, bahkan hingga bisa dua kali Rapat Paripurna dalam satu minggu. Sehingga sulit diprediksi, dan kerap berbenturan dengan kegiatan Anggota DPR RI, baik sebagai Anggota AKD, Panja, atau Pansus.

“Solusinya perlu ditertibkan kembali jadwal Rapat Paripurna, sehingga sudah bisa dipastikan pada tanggal yang sudah tertib itu, AKD tidak boleh melakukan kegiatan. Supaya seluruh anggota DPR menghadiri rapat paripurna. Walaupun ada yang tidak hadir, padahal tidak sedang melaksanakan tugas yang lain, itu memang kita sesalkan. Tapi kepada mereka, kemudian MKD melakukan teguran agar mereka mendisiplinkan dirinya,” tegas legislator dapil Sumatera Utara I itu. ■ **as/sf**

Daya Beli Petani Sawit Menurun, BPDPKS Diminta Perbaiki Kinerja

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diharapkan memperbaiki kinerjanya, dengan membentuk panitia kerja (panja) bersama DPR RI.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Selatan menurun, artinya mereka pelan-pelan termarginalkan menjadi orang yang daya belinya menurun. Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir mengapresiasi ajakan BPDPKS untuk hilirisasi industri, sehingga petani sawit bisa menjual produk dengan harga yang sudah terukur ke depannya.

“Karena ini menjadi keluhan-keluhan petani sawit yang tentunya menjadi konsen kita sebagai prioritas. Untuk diketahui, penduduk Sumsel ini 55 persen adalah petani, rata-rata terbesar menggunakan lahan sawit dan juga karet. Sehingga kalau kita perbaiki kinerja, maka nilai tukar petani di Sumatera Selatan tentu saja akan meningkat,” kata Hafisz saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan jajaran BPDPKS di Palembang, Sumsel, Selasa (19/3).

Menurut Legislator Dapil Sumsel ini, produk kelapa sawit dari zaman belanda sampai kemerdekaan hanya bisa menjual tandan buah segar sawit dan *Crude Palm Oil* (CPO) saja. Sementara di negara-negara maju sudah menjual kosmetik, padahal ini yang bisa melipatgandakan devisa bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, kelapa sawit menjadi penyumbang devisa kedua setelah minyak dan gas (migas).

“Tapi hari ini kita menyaksikan pariwisata naik ke posisi kedua penyumbang devisa terbesar di negara kita dan sawit turun ketiga. Hal ini juga tidak terlepas dari Uni Eropa dan beberapa negara pengimpor kita yang melakukan penekanan, semacam kampanye lingkungan.



Foto: Jaka Ilik

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir

Sehingga mereka menganggap sawit kita belum memenuhi kriteria sebagai hasil pertanian yang berwawasan terhadap lingkungan,” pungkasnya.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, kehadiran BPDPKS dapat menghidupkan kembali industri persawitan. Walaupun ada rencana dari pemerintah meningkatkan bahan bakar biodiesel B20 menjadi B30. Tentu ini perlu dipelajari, apakah tidak berbenturan dengan kondisi industri Indonesia saat ini yang masih menggunakan Euro 3.

“Saat ini mobil diesel kita itu masih Euro 3 dan Euro 4, sementara *environment green* sudah mengharuskan Euro 5 dan Euro 6. Nah, apakah industri kita sudah siap untuk hal ini, itu juga akan dikaitkan kepada kesiapan pemerintah dan masyarakat,” ungkap Hafisz sembari menambahkan bahwa permasalahan ini harus dirapatkan secara lintas kementerian.

Maka dari itu, Komisi XI DPR RI akan mengundang dari 7 lintas instansi untuk disatukan pemikirannya jika ingin menuju Go Green. “Artinya ini harus disepakati oleh semua sektor. Jangan nanti hanya di bidang transportasinya saja, tapi industri-industri yang pakai mesin genset dan lain sebagainya masih mengadopsi mesin yang lama, sehingga sia-sia kalau kemudian kita membuat *greenfuel* dan biodiesel,” tutupnya. ■ **jk/sf**

Komisi X Apresiasi Kolaborasi SKPD Tingkatkan Industri Ekraf Banyuwangi

Anggota Komisi X DPR RI SY Anas Thahir mengapresiasi kolaborasi dan koordinasi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang telah meningkatkan dan mengoptimalkan industri ekonomi kreatif (ekraf) dan pariwisata.

Kreatif Sanggar Genjah Harum, Pusat Kerajinan Mebel Ekspor, dan Objek Wisata Pantai Solong.

“Program Pemerintah Daerah dan Bekraf dalam mendukung ekonomi kreatif sudah baik dilakukan dan mesti dilanjut serta ditambah manfaatnya.

“Program Pemerintah Daerah dan Bekraf dalam mendukung ekonomi kreatif sudah baik dilakukan dan mesti dilanjut serta ditambah manfaatnya. Seperti disampaikan asosiasi pelaku UKM Banyuwangi, perhatian pemerintah pusat dan daerah sudah sangat baik.

Sinergi Pemkab Banyuwangi dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pun dinilai sudah berjalan dengan baik.

Hal itu diungkapkan Anas saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI bertemu dengan Asisten Bupati Bidang Pembangunan & Kesra Banyuwangi, seluruh jajaran SKPD,

perwakilan rumah kreatif, perwakilan komunitas-komunitas pelaku industri kreatif se-Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (19/3).

Usai pertemuan, Tim Kunspek Komisi X DPR RI melanjutkan kunjungan lapangan ke Mall Pelayanan Publik, Lounge Pelayanan Publik, Pelaku Industri Batik Kreatif Sekar Jagat, Pelaku Industri Kopi



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi, Jawa Timur

Seperti disampaikan asosiasi pelaku UKM Banyuwangi, perhatian pemerintah pusat dan daerah sudah sangat baik. Pendampingan usaha juga maksimal. Fasilitas lain-lainnya juga berjalan baik dan dibantu,” jelas Anas.

Usai berdiskusi dengan pelaku UKM di Banyuwangi, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai pemasaran produk UKM dan ekraf sudah berjalan baik. Mengingat, hasil pengrajin dan pelaku ekraf sudah bisa mensuplai 60 persen kebutuhan produk-produk ekraf di Denpasar yang dikonsumsi oleh wisatawan asing.

Sementara untuk sektor pariwisata, legislator dapil Banyuwangi ini mengapresiasi perkembangan pariwisata yang sangat signifikan. Bahkan, perkembangannya luar biasa dan lebih cepat daripada daerah lain. “Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, saya lihat capaian pariwisatanya sudah mencapai 500 persen, terlihat dari peningkatan jumlah wismanya,” puji Anas. ■ **gd/sf**



Fasilitas RS Siloam Sriwijaya Memadai Layani Peserta Jamkestama

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing menilai pelaksanaan standar pelayanan untuk peserta Jamkestama di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan sudah berjalan sesuai yang diharapkan.



Foto: Eka Jjk

Tim Kunker BURT DPR RI meninjau fasilitas RS Siloam Sriwijaya di Palembang

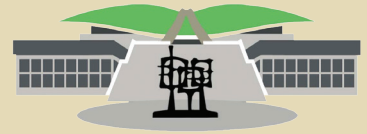
Selain itu, kerapihan, kesigapan dan kebersihan dari RS ini sudah sesuai dengan standar yang diinginkan. Fasilitas yang dimiliki RS Siloam Sriwijaya ini pun dinilai sudah memadai.

“Kami berkunjung ke Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang ini, dan melihat sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi waktu kita datang disambut, ada jalur khusus untuk pemegang Jamkestama. Tidak perlu isi form, langsung dilayani. Dan kamarnya walaupun ada kamar VVIP, tapi Anggota DPR kalau dirawat di sini dapatnya *President Suite*,” kata Anthon saat memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI meninjau fasilitas RS Siloam Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (13/3).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, sebagai mitra kerja pelaksana

Jamkestama untuk Anggota DPR RI, PT. Jasindo harus memilih RS sebagai RS *provider*-nya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga ia berharap, standar pelayanan seluruh RS yang ada di Indonesia untuk peserta Jamkestama menjadi sama. Jasindo harus menyamakan standar pelayannya, sehingga pelayanan yang didapatkan peserta Jamkestama menjadi sama.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budisantoso menambahkan, PT. Jasindo sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh RS *provider*-nya untuk menyamakan standar pelayannya terhadap para pemegang kartu Jamkestama, sehingga tidak ada perbedaan lagi begitu masuk mendapat pelayanan dari RS *provider* Jasindo. ■ **hr/sf**



Ketua DPR Bambang Soesatyo menerima penghargaan Rekor MURI atas penyelenggaraan Turnamen Catur dan Piala Ketua DPR tahun 2019 yang diikuti sekitar 1000 pecatur sekaligus membuka acara tersebut, Sabtu (23/3). Foto: Eno



Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir menyampaikan laporan uji kepatutan dan kelayakan Calon Hakim Konstitusi sekaligus menyetujui Aswanto dan Wahiduddin Adams sebagai Calon Hakim Konstitusi periode 2019-2024 dalam sidang Paripurna, Selasa (19/3). Foto: Gerald



Tim Kunspek Komisi VII DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Gus Irawan Pasaribu saat meninjau Lokasi Perumahan Warga di Gang Perintis III Kota Medan yang menggunakan jaringan pipa gas untuk kebutuhan rumah tangga. Kamis (21/03), foto : Eka Hindra

